

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. (Yunita M, 2011)

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan harus mampu meningkatkan taraf hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. (Yunita M, 2011)

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Kumalasari, M, 2011).

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Namun paradigma pembangunan tersebut banyak menuai kritik karena hasil dari pembangunan telah menciptakan pula ketimpangan dan kesenjangan, kerusakan ekologi, serta membelenggu kebebasan asasi manusia. Paradigma pembangunan yang bersifat materialistik ini mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik, sehingga cenderung mengabaikan dimensi manusia sebagai subyek utama pembangunan dan mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan.

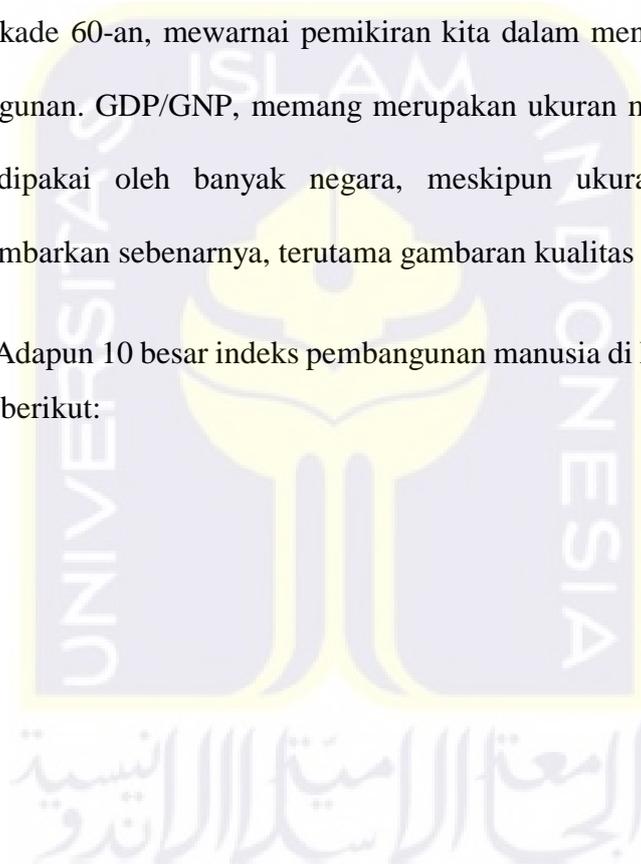
Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (UNDP, Human Development Report, 1993)

Dalam *Indonesian Human Development Report*, dijelaskan bahwa perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Serta kebutuhan dalam

meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia. (UNDP, Human Development Report, 1993)

Adanya peringkat pertumbuhan ekonomi GNP/GDP yang muncul pada dekade 60-an, mewarnai pemikiran kita dalam mengukur keberhasilan pembangunan. GDP/GNP, memang merupakan ukuran makroekonomi yang masih dipakai oleh banyak negara, meskipun ukuran tersebut belum menggambarkan sebenarnya, terutama gambaran kualitas manusianya.

Adapun 10 besar indeks pembangunan manusia di Negara maju adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (%)
ACEH	69.45
SUMATERA UTARA	69.51
SUMATERA BARAT	69.98
RIAU	70.84
JAMBI	68.89
SUMATERA SELATAN	67.46
BENGKULU	68.59
LAMPUNG	66.95
KEP. BANGKA BELITUNG	69.05
KEP. RIAU	73.75
INDONESIA	69.55

Sumber : Bps Sumatera dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang pertama adalah DKI Jakarta sebesar 78.99 disusul DI Yogyakarta yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu sebesar 77,59 dan posisi Sumatera Utara yang berada di posisi 9 dari indeks pembangunan manusia seluruh Indonesia. Tingginya angka IPM di DKI Jakarta karena dia memiliki beberapa peringkat tertinggi di Indonesia dalam kategori kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, di mana hampir 100% penduduknya melek huruf dan persentase sangat tinggi dari lulusan pendaftaran dan kuliah.

Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja hingga Februari 2015 telah mencapai 120,8 juta orang, atau bertambah sebanyak 6,2 juta orang dibanding Agustus 2014. Sementara jika dibandingkan Februari 2014, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2015 menunjukkan pertambahan 2,7 juta orang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2015 tercatat 5,81 persen, atau menurun dibanding TPT pada Agustus 2014 yang mencapai 5,94 persen. Angka ini meningkat dibandingkan TPT pada Februari 2014 sekitar 5,7 persen. Sementara itu Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp. 2.724,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.157,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya kinerja

investasi (minus 4,72 persen) dan ekspor (minus 5,98 persen). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,30 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, dan Pulau Kalimantan 8,26 persen. (Badan Pusat Statistik, Statistik Tahunan, 2015)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dihindari oleh suatu Negara maupun daerah, karena pengangguran ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi ini dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat menurun. Semakin rendah angka pengangguran maka akan semakin makmur kehidupan masyarakat suatu Negara, begitu pula sebaliknya.

Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Adanya kesenjangan angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (2000) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan

yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.

Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita mengakibatkan semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia.

Melihat data statistika Sumatera Utara dalam angka (2002), jumlah penduduk Sumatera utara yang merupakan angkatan kerja adalah sebanyak 5,28 juta jiwa yang terdiri dari 4,93 juta jiwa terkategori bekerja dan sebesar 0,36 juta jiwa terkategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka). Penduduk Sumatera Utara yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 55,56 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Sumatera Utara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 16,45 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa (termasuk pegawai negeri sipil), yaitu sebesar 11,25 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 322.807 orang atau 6,55 persen saja.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian meningkat

selama tahun 2013, setelah sedikit meningkat pada tahun 2012 yakni 6,28 persen. Perekonomian Sumatera Utara diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp.117,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.118,808 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2010 mencapai angka tertinggi selama periode 10 tahun terakhir setelah sebelumnya sedikit melambat. Perekonomian Sumatera Utara yang dicapai pada tahun 2010 dipicu oleh hampir seluruh sektor ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Sumatera Utara Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2006-2015”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
3. Sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang Indeks pembangunan manusia, Kemiskinan, Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab membahas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teoritis, hubungan antar variabel, tinjauan empiris, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas jenis dan sumber data, metode analisis, dan defenisi operasional.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan bab ini menganalisa perkembangan IPM, Kemiskinan dan Pengangguran dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

BAB V Kesimpulan dan Implikasi

Pembahasan pada bab ini menyimpulkan hasil analisis dan saran yang bermanfaat bagi banyak